

# BAB 1

## Pendahuluan

**BAB I Berisi :**

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertugas membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Selain itu Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai fungsi antara lain :

1. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan yang menjadi kewenangan provinsi;
2. Penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang keuangan yang menjadi kewenangan provinsi;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
4. Penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi di bidang keuangan;
5. Penyelenggaraan administrasi Badan Keuangan Daerah.

Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pengambilan kebijakan di bidang keuangan, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengidentifikasi permasalahan utama yang menjadi isu strategis yang berkembang selama tahun 2018. Adapun masalah yang menjadi isu strategis selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya penerimaan pendapatan asli daerah dalam mendukung anggaran pendapatan dan belanja daerah, hal ini dapat dilihat dari kontribusi pendapatan asli daerah pada pendapatan daerah yang masih dibawah 40 % (data realisasi tahun 2017 : 31.57 %);
2. Masih lemahnya pengelolaan keuangan daerah, hal ini dapat dilihat dari capaian hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2016 hanya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
3. Masih kurangnya pelayanan kepada masyarakat terutama kepada wajib pajak yang ada pada Unit Pelaksana Teknis Badan keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

# BAB 2

## Perjanjian Kinerja

### BAB II Berisi :

1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

### 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Perencanaan strategi merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Sasaran strategis merupakan gambaran singkat mengenai sasaran strategis yang ingin diraih, dan bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi yang dapat dijabarkan dalam tabel sasaran strategis dalam kurun waktu 5 tahun sebagai berikut:

**Tabel. 2.1**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Capaian					
			SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD	prosentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD	%	84,8 5%	87,3 2%	87,5 2%	88,1 9%	88,82 %
2	Meningkatkan kontribusi redistribusi daerah dan LLPADS daerah terhadap PAD	prosentase kontribusi redistribusi daerah dan LLPADS daerah terhadap PAD	%	15,1 5%	12,6 8%	12,4 8%	11,8 1%	11,18 %

3	Meningkatkan kualitas penata usahaan, perbendaharaan dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sesuai peraturan	Prosentase penata usahaan, perbendaharaan dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sesuai peraturan	%	100	100	100	100	100
4	Meningkatkan kewajaran nilai aset daerah yang disajikan dalam laporan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Nilai aset daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat diyakini kewajarannya	Nilai	4.63 3.23 8.27 8.09 3,17	4.92 9.40 3.05 3.58 7,66	5.24 4.49 9.20 4.71 5,99	5.57 9.73 6.85 8.45 1,54	5.936. 403.49 5.221, 56
5	Meningkatkan ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD perubahan provinsi dan Kabupaten/Kota	Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD perubahan provinsi dan Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100
6	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah	Nilai	79,0 0	80,2 5	81,5 0	82,7 5	84,00

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan DPA. Berikut Perjanjian Kinerja tahun 2018:

**Tabel 2.2**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	6	
1	Meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD	prosentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD	84.85 %	program peningkatan tata kelola pendapatan pajak daerah	Rp. 5.155.672.514 ,-
2	Meningkatkan kontribusi Retribusi daerah dan LLPADS daerah terhadap PAD	prosentase kontribusi Retribusi daerah dan LLPADS daerah terhadap PAD	100 %	program peningkatan tata kelola pendapatan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain	Rp. 539.812.100,-
3	Meningkatkan kualitas penata usahaan, perbendaharaan dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sesuai peraturan	prosentase penata usahaan, perbendaharaan dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sesuai peraturan	100 %	program peningkatan pelayanan verifikasi dan perbendaharaan	Rp. 307.701.000,-
				program peningkatan pelayanan akuntansi dan pelaporan	Rp. 1.105.197.642,-
4	Meningkatkan kewajaran nilai	nilai aset daerah Provinsi	Rp.4.633.238.278.0	program peningkatan tata kelola asset	Rp. 1.441.326.800,-

	asset daerah yang disajikan dalam Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kepulauan Bangka Belitung yang dapat diyakini kewajarannya	93,17		
5	Meningkatkan ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	program penganggaran pembangunan daerah	Rp. 3.411.730.800,00
6	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah	Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah	nilai	program peningkatan tata kelola pendapatan pajak daerah	79,00 (Mutu Pelayanan Kategori B, Menurut Permenpan No.14 Tahun 2017)

# BAB 3

## Akuntabilitas Kinerja

### BAB III Berisi :

1. Capaian Kinerja
2. Realisasi Anggaran

### 3.1. Capaian Kinerja

Laporan kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan pengukuran, evaluasi kinerja dan pengungkapan secara memadai sesuai Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tingkat capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018 dengan realisasinya, yaitu seperti formulasi sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = ( \text{Realisasi/Rencana} ) \times 100 \%$$

Capaian kinerja lebih lanjut dapat dinilai dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori Nilai Kinerja	Kode Warna
1.	$91 \leq$	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	

4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Belitung sebesar **92.33 %** dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran. Dari kelima sasaran kinerja yang ditetapkan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 dinyatakan **"berhasil"** dengan Kategori Nilai Kinerja "Sangat Tinggi", interval nilai kinerja di atas **91%**.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan. Capaian kinerja sendiri diukur dengan cara sebagai berikut:

### 1. Sasaran : Meningkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

#### Indikator Kinerja : Prosentase kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Dalam upaya pencapaian sasaran meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD, indikator kinerja yang menjadi dasarnya yaitu " prosentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD" untuk mengukurnya. Untuk capaian kinerja atas sasaran "meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD" pada tahun 2017 tidak diukur karena masih menggunakan indikator kinerja utama yang lama (Renstra DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017), sedangkan untuk tahun 2018 menggunakan indikator kinerja utama yang baru berdasarkan hasil coaching dengan tim dari Kemenpan RB RI yang mana di targetkan sebesar 84,85 % dengan capaian sasaran indikator kinerja tahun 2018 sebesar 92,54 %.

Berikut ini hasil pengukuran capaian kinerja tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1.1**

**Capaian Indikator Kinerja**

Indikator Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian Nilai	Tahun 2018		Capaian Nilai
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Meningkatnya kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	prosentase kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	%	-	-	-	84,85%	92,54%	109,06%
<b>Rata-Rata</b>								

Target prosentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2018 meningkat sebesar meningkat sebesar 3.91 % jika dibandingkan pada tahun 2017 yang mencapai nilai persentase sebesar 88.63%. Begitu pula jika dibandingkan dengan target menengah (tahun ke-3/2020) Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 yang menargetkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 87.5 %, maka capaian tahun melebihi target sebesar 5.04 %. pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyumbang kontribusi sebesar Rp. 787.235.519.038.83 (tujuh ratus delapan puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan belas ribu tiga puluh delapan koma delapan puluh tiga rupiah) dari total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 850.705.473.042,00 (Delapan ratus lima puluh milyar tujuh ratus lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah).

Tercapainya target pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan beberapa faktor diantaranya :

- Adanya penyesuaian tarif pajak daerah;
- Meningkat intensifikasi pada sumber-sumber pajak daerah;
- Peningkatan pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis.

Adapun program yang bertanggungjawab terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama ini adalah Bidang Pajak Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung, dengan pagu total program peningkatan tata kelola pajak daerah sebesar Rp. 5.155.672.514,00 (lima milyar seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua belas rupiah) terealisasi sebesar Rp. 4.186.678.164,00 (empat milyar seratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah) atau sebesar 81.21 % dan capaian fisik Program sebesar 378.94 %. Kegiatan yang mendukung program ini sebanyak 12 (duabelas) kegiatan dengan capaian kinerja kegiatan rata-rata sebesar 102.26 %.

## **2. Sasaran : "Meningkatkan kontribusi retribusi daerah dan LLPADS daerah terhadap PAD"**

### **Indikator Kinerja "Prosentase kontribusi Retribusi daerah dan LLPADS daerah terhadap PAD"**

Selain pajak daerah, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengkoordinasikan bagian Pendapatan Asli Daerah, antara lain : Retribusi Daerah, Pendapatan dari Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pada tahun 2018 Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menargetkan kontribusi pendapatan retribusi daerah, pendapatan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 15.15 %. Walaupun Badan Keuangan Daerah hanya berfungsi sebagai koordinator dan regulator terhadap pendapatan PAD selain pajak daerah ini, namun tetap memiliki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pencapaian target yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018.

Tabel berikut menyajikan target sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 sebagai berikut :

**Tabel 3.1.2**  
**Capaian Indikator Kinerja**

Indikator Sasaran	Indikator Kinerja	satuan	Tahun 2017		Capaian %	Tahun 2018		Capaian %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Meningkatnya kontribusi Retribusi daerah dan LLPADS Daerah terhadap PAD	prosentase kontribusi Retribusi daerah dan LLPADS Daerah terhadap PAD	%	-	-	-	15,15%	7,46%	49,24%
<b>Rata-Rata</b>								

Target prosentase kontribusi retribusi daerah, pendapatan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap PAD pada tahun 2018 menurun sebesar 3.91 % jika dibandingkan pada tahun 2017 yang mencapai nilai persentase sebesar 11.37%. Begitu pula jika dibandingkan dengan target menengah (tahun ke-3/2020) renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 yang menargetkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 12.48 %, maka capaian tahun 2018 kurang dari target sebesar 5.02 %. Retribusi daerah, pendapatan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyumbang kontribusi sebesar Rp. 63.469.954.003.17 (enam puluh tiga milyar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga koma tujuh belas rupiah) dari total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 850.705.473.042,00 (delapan ratus lima puluh milyar tujuh ratus lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah).

Tidak tercapainya target retribusi daerah, pendapatan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan beberapa faktor diantaranya :

- a. Kecilnya pendapatan pada retribusi tempat pencetakan peta, dikarenakan tidak banyak lagi Ijin Usaha Pertambangan yang melakukan cetak peta. Hal ini dikarenakan sebagian besar IUP pada wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak produksi lagi;

- b. Tidak tercapainya target pada pendapatan Lain-lain PAD yang sah pada pendapatan jasa giro dan pendapatan bunga terhadap penyimpanan kas keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun program yang bertanggungjawab terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama ini adalah bidang retribusi dan LLPADS Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Pagu Total Program Peningkatan Tata Kelola Retribusi Daerah dan LLPADS sebesar Rp. **539.812.100,00** (Lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu seratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. **476.881.634,00** (empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) atau sebesar 88.34 % dan capaian fisik Program sebesar 0.00 %. Kegiatan yang mendukung program ini sebanyak 4 (empat) kegiatan dengan capaian kinerja kegiatan rata-rata sebesar 101.25 %.

### **3. Sasaran : Meningkatkan kualitas penatausahaan, perbendaharaan dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sesuai peraturan**

#### **Indikator Kinerja : Prosentase penatausahaan, perbendaharaan dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sesuai peraturan**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan didukung oleh Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan dan Program Peningkatan Fungsi Perbendaharaan dan Verifikasi, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mencapai sasaran Peningkatan Kualitas Penatausahaan, Perbendaharaan dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan capaian sebagai berikut :

**Tabel 3.1.3**  
**Capaian Indikator Kinerja**

Indikator Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian %	Tahun 2018		Capaian %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Meningkatnya Kualitas Penatausahaan, Perbendaharaan dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sesuai peraturan	Prosentase Penatausahaan, Perbendaharaan dan Pelaporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sesuai peraturan	%	-	-	-	100 %	100 %	100 %
<b>Rata-Rata</b>					-			<b>100 %</b>

Target Indikator Kinerja Utama Prosentase Penatausahaan, Perbendaharaan dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini didukung oleh capaian Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan yang mencapai realisasi target program sebesar 100 % dan capaian Program Peningkatan Fungsi Perbendaharaan dan Verifikasi yang merealisasikan target capaian sebesar 100 %

**4. Sasaran : Meningkatkan kewajaran nilai asset daerah yang disajikan dalam laporan barang milik daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

**Indikator Kinerja : Nilai aset daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat diyakini kewajarannya**

Sebagai leading sector pengelolaan keuangan dan asset Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas dalam pengelolaan asset. Nilai asset daerah yang diyakini kewajarannya merupakan bagian penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Nilai asset ini mencerminkan kinerja yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berikut merupakan capaian yang diraih dalam tahun 2018 :

**Tabel 3.1.4**  
**Capaian Indikator Kinerja**

Indikator Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian %	Tahun 2018		Capaian %
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Meningkatkan kewajaran nilai aset daerah yang disajikan dalam Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Nilai aset daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat diyakini kewajarannya	nilai	-	-	-	4.633.238.278.093,17	5.527.109.252.101,10	<b>119.29 %</b>
<b>Rata-Rata</b>					-			<b>119.29 %</b>

Pada tahun 2018 tercatat nilai aset yang diyakini kebenarannya sebesar Rp. 5.527.109.252.101,10 (lima triliun lima ratus dua puluh tujuh milyar seratus sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus satu koma satu rupiah) atau naik sebesar Rp. 893.870.974.007,93 (delapan ratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh koma sembilan puluh tiga rupiah) dari tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp. 4.633.238.278.093,93 (empat triliun enam ratus tiga puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh tiga koma sembilan puluh tiga rupiah) atau dengan kata lain capaian pada tahun 2018 sebesar 119.29 %.

Sedangkan jika dibandingkan dengan target pada medio renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Tahun ke – 3/2020) tercatat pada target Renstra sebesar Rp. 5.244.499.204.715,99 (Lima triliun dua ratus empat puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat ribu tujuh ratus lima belas koma sembilan puluh sembilan rupiah), capaian tahun 2018 telah melampaui target dimaksud.

Capaian target ini tidak lepas dari kerja keras program peningkatan tata kelola aset daerah dalam melakukan penatausahaan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Nilai asset yang dianggap tidak wajar dikarenakan kurang tertibnya pengelolaan asset pada :

- Pencatatan asset tetap tanah dengan luas 0.00 M2;
- Pencatatan asset tetap gedung dan bangunan dengan luas 0.00 M2;
- Penggunaan asset tetap tanah oleh pihak lain tanpa surat izin/perjanjian;
- Rehabilitasi asset tetap yang tidak dikapitalisasi pada asset induknya
- Kurang saji atas amortisasi pada SIMDA BMD dan
- Terdapat beberapa asset tetap yang belum diketahui keberadaannya.

**5. Sasaran : Meningkatkan ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Provinsi dan Kabupaten/Kota**

**Indikator Kinerja : prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD perubahan provinsi dan kabupaten/kota**

Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertanggung jawab dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketepatan waktu penetapan APBD menjadi isu strategis yang penting dalam mencapai sasaran yang ingin di capai oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selain itu evaluasi terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota juga menjadi tanggung jawab Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut merupakan capaian Indikator Kinerja Utama prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD perubahan provinsi dan kabupaten/kota :

**Tabel 3.1.5**

**Capaian Indikator Kinerja**

Indikator Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		Capaian %	Tahun 2018		Capaian %
			Targ et	Realisasi		Target	Realisasi	
Meningkatkan ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD	Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD	Persen	-	-	-	100	91,97%	91,97%

Perubahan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Perubahan Provinsi dan Kabupaten/Kota							
<b>Rata-Rata</b>					-			91,97%

Pada bagian penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 capaian kinerja yang dihasilkan adalah sebesar 90.00%, sedangkan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan kabupaten/kota tahun 2018 dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tahun 2019 tercatat nilai sebesar 93.93% sehingga capaian Indikator Kinerja Utama prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD perubahan provinsi dan kabupaten/kota adalah sebesar 91.97%. Dari 10 unsur yang dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setidaknya ada beberapa unsur yang tidak sesuai dengan peraturan diantaranya adalah :

- Penyampaian Kebijakan Umum APBD (KUA)/Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan PPAS;
- Kesepakatan bersama Kepala Daerah dan DPRD terhadap rancangan KUA/KUPA dan PPAS;
- Penyampaian rancangan peraturan daerah APBD/Perubahan ke DPRD;
- Penyampaian keputusan pimpinan DPRD ke Mendagri.

Dari seluruh capaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung "nilai aset daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat diyakini kewajarannya" terealisasi paling tinggi yaitu sebesar 119.29% sedangkan Indikator Kinerja Utama "prosentase kontribusi retribusi daerah dan LLPADS daerah terhadap PAD" menempati posisi paling rendah dengan nilai capaian sebesar 47.92%.

Dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama ini rata-rata realisasi adalah sebesar **95.97 %**. Capaian kinerja yang **Sangat Baik** karena realisasi di atas 91.00%.

Tabel berikut menyajikan rangkuman capaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 :

**Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama  
Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2018**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
<b>Tujuan Renstra PD 1 :</b>				
Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	31,75%	32,69%	102,96%
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU) PD 1. :</b>				
Meningkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	prosentase kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	84,85%	92,74%	109,30%
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU) PD 2. :</b>				
Meningkatkan kontribusi Retribusi daerah dan LLPADS Daerah terhadap PAD	prosentase kontribusi Retribusi daerah dan LLPADS Daerah terhadap PAD	15,15%	7,26%	47,92%
<b>Tujuan Renstra PD 2 :</b>				
Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100,00%
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU) PD 3. :</b>				
Meningkatkan kualitas Penata usahaan, Perbendaharaan dan Pelaporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sesuai peraturan	Prosentase Penata usahaan, Perbendaharaan dan Pelaporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sesuai peraturan	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU) PD 4. :</b>				
Meningkatkan kewajaran nilai aset daerah yang disajikan dalam Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Nilai aset daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat diyakini kewajarannya	4.633.238.278.093,17	5.527.109.252.101,10	119,29%
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU) PD 5. :</b>				
Meningkatkan ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Provinsi dan Kabupaten/Kota	100,00%	91,97%	91,97%
<b>Tujuan Renstra PD 5 :</b>				
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan yang diberikan Oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rata-rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan yang diberikan Oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	70,00	(DALAM PROSES PERHITUNGAN)	

Indikator Kinerja Utama (IKU) PD 6. :					
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah	79,00	84,78	107,32%	
<b>RATA-RATA</b>					<b>95,97%</b>

Sedangkan pada capaian Indikator Kinerja Program yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung capaian rata-rata indikator program adalah sebesar 113.35 %, indikator kinerja program peningkatan tata kelola pendapatan pajak daerah "prosentase pertumbuhan pendapatan pajak daerah" mencapai realisasi tertinggi yaitu dari target sebesar 6.10% terealisasi sebesar 23.11%, sehingga capaian Indikator Kinerja Program sebesar 378.94%. Sedangkan Indikator Kinerja program peningkatan tata kelola pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah "prosentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan LLPADS" menempati posisi paling rendah, dari target sebesar 5.03 % realisasi Indikator Kinerja Program hanya mencapai 0.00 %, atau terealisasi sebesar 0.00%.

Tabel berikut menyajikan capaian Program yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 :

**Tabel Capaian Indikator Kinerja Program  
Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2018**

PROGRAM/KE GIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		PERSENTASE REALISASI	
		FISIK	RP	FISIK	RP	FISIK	RP
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Keseekretaria n	100	14.301.830.942,00	72,46	13.160.433.765,00	72,46%	92,02%
	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (AA=90-100, A=80-90, BB=70-80, B=60-70, CC=50-60,	69,50		76,6		110,22%	

	C=40-50)						
Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	Prosentase Pertumbuhan pendapatan pajak daerah	6,10%	5.155.672.514,00	23,11%	4.186.678.164,00	378,94%	81,21%
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah	78,00		82,52		105,80%	
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Jasa Lainnya Badan Keuangan Daerah	80,00		87,04		108,79%	
Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah	Prosentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan LLPADS	5,03%	539.812.100,00	0,00%	476.881.634,00	0,00%	88,34%
Program Peningkatan Fungsi Perbendaharaan dan Verifikasi	prosentase kesesuaian waktu pelayanan terhadap pencairan dana keuangan	100,00 %	307.701.000,00	100,00 %	225.982.110,00	100,00%	73,44%
Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan	persentase laporan keuangan PD yang sesuai dengan SAP	100,00 %	1.105.197.642,00	100,00 %	865.196.565,00	100,00%	78,28%
Peningkatan Tata Kelola Asset Daerah	persentase laporan BMD PD yang sesuai dengan Peraturan	100,00 %	1.441.326.800,00	100%	1.062.476.268,00	100,00%	73,72%
	persentase nilai asset yang dimanfaatkan terhadap seluruh nilai asset daerah	0,27%		0,27%		100,00%	
Program Penganggaran Pembangunan Daerah	Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD	100,00 %	3.411.730.800,00	90,00%	2.862.138.573,00	90,00%	83,89%

	Perubahan Provinsi						
	Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten/Kota	100,00 %		93,93%		93,93%	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM			26.263.271.798,00		22.839.787.079,00	113,35%	86,96%

Sedangkan pada capaian indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berjumlah 50 (lima puluh) kegiatan capaian rata-rata indikator kinerja kegiatan adalah sebesar 98.01 %.

Indikator kinerja kegiatan pembinaan teknis pejabat penata usahaan barang, pengurus barang pengelola dan pembantu pengurus barang pengelola pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai realisasi tertinggi yaitu dari target sebesar 177.78%, dengan output kegiatan jumlah peserta pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari target sebanyak 9 orang terealisasi sebanyak 16 orang. Sedangkan capaian terendah terletak pada kegiatan sertifikasi lahan milik pemerintah daerah yang hanya terealisasi sebesar 0.00%. Tidak terlaksananya pembuatan sertifikat bidang tanah milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan Bidang Asset Badan Keuangan Daerah tidak mendapatkan jadwal dari Badan Pertanahan Nasional pada saat yang sama sedang dilaksanakan Program Nasional Sertifikat untuk masyarakat.

Tabel berikut menyajikan capaian Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 :

**Tabel Capaian Indikator Kinerja Program**  
**Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
**Tahun 2018**

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH</b>				
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan layanan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	12,00	12	100,00%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	100,00	69,03	69,03%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya setelah mengikuti Bimtek/Diklat	20,00	17	85,00%
Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur	Jumlah pakaian dinas untuk ASN dan THL di Lingkungan BAKUDA	424,00	412	97,17%
Pengelolaan Kehumasan pada BAKUDA	Jumlah bulan layanan Pengelolaan Kehumasan pada BAKUDA	12,00	12	100,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah	3,00	3	100,00%

	diatas 85%			
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	7,00	7	100,00%
<b>Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah</b>				
Intensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah	realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah melalui PKB, BBNKB dan Pajak Air Permukaan, PPBKB dan Pajak Rokok	619.190.464.260,0 0	724.906.845.459,8 0	117,07%
Peningkatan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah	Jumlah Bulan Layanan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah	12,00	12	100,00%
Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi Terkait	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi Terkait	-		
Penyusunan Pedoman tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB yang disusun	3,00	3	100,00%
Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kota pangkalpinang	Jumlah bulan layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kota pangkalpinang	12,00	12	100,00%
Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Bangka	Jumlah bulan layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Bangka	12,00	12	100,00%
Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Belitung	Jumlah bulan layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB	12,00	12	100,00%

	Wilayah Kabupaten Belitung			
Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah bulan layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah	12,00	12	100,00%
Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Barat	Jumlah bulan layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Barat	12,00	12	100,00%
Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah bulan layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Selatan	12,00	12	100,00%
Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Belitung Timur	Jumlah bulan layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Belitung Timur	12,00	12	100,00%
Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Corner	Jumlah Bulan Layanan Fungsi Pelayanan Samsat Corner	12,00	12	100,00%
Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Keliling	Jumlah Bulan Layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Keliling	12,00	12	100,00%
<b>Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah</b>				
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Penerimaan Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	jumlah Perangkat Daerah dan pihak terkait penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain	40,00	42	105,00%
Rakor Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Jumlah penyelenggaraan Rakor Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	1,00	1	100,00%
Penyusunan Pedoman Tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Peraturan Gubernur Tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Daerah	2,00	2	100,00%

Tim peningkatan pengawasan pendapatan daerah	Laporan hasil pengawasan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2,00	2	100,00%
<b>Program Peningkatan Fungsi Perbendaharaan dan Verifikasi</b>				
Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD	Jumlah peserta Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD	120,00	118	98,33%
Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Jumlah dokumen register SP2D, Buku Kas Umum B.IX BUD, Laporan posisi kas harian dan laporan posisi kas bulanan	4,00	4	100,00%
Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di Lingkungan Prov Kep Bangka Belitung	Jumlah bulan layanan Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di Lingkungan Prov Kep Bangka Belitung	12,00	12	100,00%
<b>Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan</b>				
Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	7,00	7,00	100,00%
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1,00	1,00	100,00%
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1,00	1,00	100,00%
Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Nota Kesepakatan antara Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1,00	1,00	100,00%

	dalam Penyusunan Laporan Keuangan			
Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA Keuangan	Jumlah bulan layanan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA Keuangan	12,00	12,00	100,00%
<b>Peningkatan Tata Kelola Asset Daerah</b>				
Penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2,00	2	100,00%
Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1,00	1	100,00%
Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah peserta Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	9,00	16	177,78%
Penyusunan pedoman tentang pengelolaan barang milik daerah	Jumlah pergub tentang pengelolaan barang milik daerah	1,00	1,00	100,00%
Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA BMD	Jumlah bulan layanan sistem Aplikasi SIMDA ter-update	12,00	12,00	100,00%
Sertifikasi Lahan Milik pemerintah daerah	Jumlah Sertifikat lahan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	20,00	-	0,00%
Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah	2,00	2,00	100,00%

Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Peserta Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	200,00	177,00	88,50%
Penyusunan rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dan Pemeliharaan	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan dan Pemeliharaan	1,00	1,00	100,00%
Penilaian/Appraisal Barang Milik Daerah/Asset Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Asset yang sebelumnya bernilai Rp.0,00/Rp 1,00 dan Asset yang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga	1,00	1	100,00%
Penghapusan barang milik daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Keputusan Gubernur tentang penetapan penghapusan barang milik daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1,00	1	100,00%
<b>Program Penganggaran Pembangunan Daerah</b>				
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang APBD	4,00	4	100,00%
Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD	Jumlah peserta Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD	200,00	109	54,50%
Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Jumlah peserta Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	100,00	108	108,00%

Penyusunan Analisa Standar Belanja	Jumlah keputusan Gubernur tentang Analisa Standar Belanja	1,00	1	100,00%
Penyusunan pedoman tentang penyusunan RKA-PD/PPKD	Jumlah Rapergub tentang pedoman penyusunan RKA-PD/PPKD	1,00	1	100,00%
Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan	4,00	4	100,00%
Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD	14,00	14	100,00%
Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	8,00	8	100,00%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN</b>				<b>98,01%</b>

### 3.2. REALISASI ANGGARAN

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan strategis pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 adalah sebesar 86.96 %. Dari anggaran perubahan sebesar Rp. 26.263.271.798,00 (dua puluh enam milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) teralisasi sebesar Rp. 22.839.787.079,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah).

Capaian realisasi anggaran terbesar terdapat pada Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mencapai 92.02 %. Dari pagu anggaran sebesar Rp. 14.301.830.942,00 (empat belas milyar tiga ratus satu juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) teralisasi sebesar Rp. 13.160.433.765,00 (Tiga belas milyar seratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).

Sedangkan capaian realisasi anggaran terendah dicapai oleh program peningkatan fungsi perbendaharaan dan verifikasi. Dari pagu anggaran sebesar Rp. 307.710.000,00 (tiga ratus tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 225.982.110,00 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah) atau hanya terealisasi sebesar 73.44 %.

# BAB 4

## Penutup

**BAB IV Berisi  
Kesimpulan dari hasil  
Penyusunan Laporan  
Akuntabilitas Kinerja  
(LAKIN) BAKUDA TA. 2018**

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun anggaran 2018. Pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, mencakup pengukuran pencapaian sasaran strategis (Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pencapaian Indikator Kinerja Program, dan Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018.

Dari uraian diatas, maka dalam pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat disimpulkan antara lain :

1. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum telah mencapai sasaran strategis/Indikator Kinerja Utama dengan kategori **"SANGAT BAIK"** (nilai capaian 95.97%);
2. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kinerja BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Peningkatan koordinasi antar unit kerja dan instansi terkait dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan terus ditingkatkan;

4. Peningkatan pelayanan publik akan terus ditingkatkan dengan memperhatikan ketercukupan sumber daya manusia yang berkualitas, penyediaan sarana dan prasarana pada Unit Pelaksana Teknis serta pelayanan prima kepada masyarakat;
5. Untuk peningkatan pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang efektif dan berhasil guna diperlukan penyatuan dan pemahaman visi dan misi organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 ini disampaikan, dan semoga dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan tugas selanjut agar menjadi lebih baik, terima kasih.

**Pangkalpinang,   Maret 2019**

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**FERI AFRIYANTO  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19700409 199603 1 004**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018, yang mana penyusunannya mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) tahun 2018 Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2018.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 ini ada beberapa kesalahan ataupun kekurangan yang akan diperbaiki dengan komitmen penuh dari seluruh stakeholders dan komponen yang ada di Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada

semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja (LAKIN) Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas-tugas dan semakin memacu kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimasa yang akan datang.

**Pangkalpinang,   Maret 2019**  
**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**FERI AFRIYANTO**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19700409 199603 1 004**